DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2021

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang, mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang diatasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**

Jabatan : MENTERI PERHUBUNGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
MENTERI PERHUBUNGAN	**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
BUDI KARYA SUMADI	**R. AGUS H. PURNOMO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk *loop* secara teratur	%	25
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	82
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,21
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,29
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,4
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

Kegiatan		Anggaran
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	Rp.	2.474.925.608,000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	Rp.	3.290.211.155,000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	Rp.	87.015.875,000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	Rp.	1.056.459.887,000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	Rp.	861.524.045,000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	Rp.	3.658.058.243,000

Disetujui
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2021
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO